



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCAIRAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2021 – 2022
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke – 25
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 29 Juni 2022
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 14.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI dan secara Virtual Zoom Cloud Meeting dari tempat masing-masing
Acara	: Evaluasi penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan; Jembatan timbang; Subsidi Bidang Angkutan Darat; Konektivitas Transportasi di Jabodetabek; dan Kendala yang dihadapi.
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: Orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Dirjen Perhubungan Darat, Kepala BPTJ, Dirut PT.ASDP Indonesia Ferry dan Dirut Perum DAMRI beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat dan Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan pada hari ini adalah membahas Evaluasi penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan; Jembatan timbang; Subsidi Bidang Angkutan Darat; Konektivitas Transportasi di Jabodetabek; dan Kendala yang dihadapi.
3. Ketua Rapat mempersilakan Dirjen Perhubungan Darat, Kepala BPTJ, Dirut PT ASDP dan Dirut Perum DAMRI untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat, BPTJ, PT. ASDP Indonesia Ferry, dan Perum DAMRI agar berkoordinasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi darat, termasuk pengawasan dan audit secara berkala terhadap semua moda transportasi darat.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program Subsidi Angkutan Umum Massal Perkotaan (skema *Buy the Service/* BTS) dan subsidi angkutan barang perintis, serta melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI dalam Rapat mendatang.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat, BPTJ, PT. ASDP Indonesia Ferry, dan Perum DAMRI untuk memperhatikan masukan dan saran Komisi V DPR RI, antara lain:
 - a. Optimalisasi potensi penerimaan dan pemanfaatan PNBPN di sektor perhubungan darat;
 - b. Memberikan solusi terhadap kemacetan di Pelabuhan penyeberangan;
 - c. Meningkatkan kualitas layanan transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. Memperhatikan ketersediaan jembatan timbang di wilayah yang banyak dilalui kendaraan bertonase besar;
 - e. Meningkatkan koordinasi antar *stakeholders* dalam rangka terwujudnya integrasi transportasi antar moda.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB.

Jakarta, 29 Juni 2022

KETUA RAPAT,



LASARUS

Pit. KEPALA BPTJ
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



UMAR ARIS

Pit. DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,



CUCU MULYANA